

Daftar Pustaka

A. Buku-buku

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Legal theory Dan Teori Peradilan Judicialprudance*, Kencana, Makasar, 2007;
- Achmad Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Bayumedia, Malang, 2007;
- Ade Saptomo, *Hukum dan Kearifan Lokal*, Grasindo, Jakarta, 2009;
- Adrian Sutedi, *Tinjauan Hukum Pertanahan*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2009;
- A. Hamzah, *Hukum Pertanahan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991;
- A.P. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009;
- Arie S. Hutagalung, *Serba Aneka Masalah Tanah Dalam Kegiatan Ekonomi (Suatu kumpulan karangan)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1999;
- Asnawi M.N, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press, Jakarta, 2013;
- Bernad Arif Sidharta, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal, dalam Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009;
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2005;
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2003;
- C.S.T Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009;
- Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal: Tinjauan terhadap Pemberlakuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007;
- Eddy Ruchiyat, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*, Alumi, Bandung, 1999;
- Efendi, Bachtiar, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung, 1983;

- Fanani A.Z., *Berfilsafat Dalam Putusan Hakim (Teori dan Praktek)*, Mandar Maju, Bandung, 2013;
- Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019;
- G. Kartasapoetra, dan kawan-kawan, *Manajemen Penanaman Modal Asing*, Bina Aksara, Jakarta, 1995;
- H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Kapita Selekt 2, Teori Hukum, Teknik Pembuatan Akta (TPA), Hukum Investasi, Metode Penelitian Hukum, Hukum Perikatan, Hukum Keluarga, Dan Hukum Kontrak Elektronik Dalam Bentuk Tanya Jawab*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, Jawa Barat, 2021;
- H. Zainuddin Ali, *Aspek Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, Ciputat, Tangerang, 2014;
- Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, terjemahan dari “General Theory of Law and State” oleh Somardi, Bee Media Indonesia, Jakarta, 2007;
- Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008;
- Henry Bernstein, dan kawan-kawan, *Kebangkitan Studi Reforma Agraria di Abad 21*, STPN Press, 2008;
- Heru Nugroho, *Reformasi Politik Agraria Mewujudkan Pemberdayaan Hak-Hak Atas Tanah*, Mandar Maju, Bandung, 2002;
- Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen: Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Daalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan dengan Pelaku Usaha*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2021;
- Hulman Panjaitan, S.H., M.H., *Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953 – 2008 Berdasarkan Penggolongannya*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014;
- Hulman Panjaitan dan Anner Mangatur Sianipar, *Hukum Penanaman Modal Asing*, CV Indhill Co, Jakarta, 2008;
- Hulman Panjaitan dan Abdul Mutalib Makarim, *Komentar Dan Pembahasan Pasal Demi Pasal Terhadap UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Ind Hill Co, Jakarta, 2007;
- I Wayan Suandra, *Hukum Pertanahan Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994

John Austin sebagaimana dikutip oleh: Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, CV. Utomo, Bandung 2006;

Juhaya Praja S, *Teori Hukum Dan aplikasinya*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011;

Lusiana, Editor: Yudhi Setiawan, *Usaha Penanaman Modal di Indonesia*, PT. Rajawali Pers, 2012;

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Cetakan ke-13, Jakarta, 2013;

Maria S.W. Sumardjono, *Puspita Serangkum Masalah Hukum Agraria*, Liberty, Yogyakarta, 1982;

Mas Rahmah, *Hukum Investasi*, Kencana, Jakarta, 2020;

Muchsin, dan kawan-kawan, *Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektip Sejarah*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2010;

Mustofa dan Suratman, *Penggunaan Hak Atas Tanah Untuk Industri*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013;

O.C. Kaligis, *Asas Kepatutan dalam Arbitrase*, PT. Alumni, Bandung, 2009;

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1989;

Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase*, Kencana, Jakarta, 2009;

Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008;

Sasangka H., *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 2005;

Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, CV. Nuansa Aulia, Cetakan Ketiga, Bandung, 2018;

Soedarto Gautama, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria (Memori Penjelasan di bawah 11) Dasar-dasar dari Hukum Agraria Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993;

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004;

Sri Hajati, dan kawan-kawan, *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2020;

Sri Hajati, dan kawan-kawan, *Buku Ajar Pokitik Hukum Pertanahan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2018;

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1999;

Suhendro, *Hukum Investasi di Era Otonomi Daerah*, Gita Nagari, Yogyakarta, 2005;

Urip Santoso, *Pendaftaran Tanah dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2010;

Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Cetakan Kedua Puluh Empat, Jakarta, 1990;

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009;

Wirjono Prodjodikuro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1977.

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang ada di atasnya;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Nomor 246 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 2014, Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5280);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara 2009, Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5077);

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara 2009, Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5079);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 2009, Nomor 130);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Nomor 112 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 139 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4899);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara 2004, Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4380);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara 1999, Nomor 138 Tahun, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 1999/Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 385);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara 1986, Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (lembaran Negara 1986, Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327), yang telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 No.1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818);

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap;

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Nomor 28 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6630);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Izin Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Nomor 14 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812), yang dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 1997);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996) yang telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Nomor 28 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6630);

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Putusan Mahkamah Konstitusi terdaftar dalam perkara No. 21-22/PUU-V/2007;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.010/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010.2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu;

Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan;

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, yang dicabut dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020;

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 yang dicabut dengan Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 37/SK/1999 tahun 1999, tentang Pelimpahan Kewenangan Persetujuan dan Fasilitas serta Pemberian Pelaksanaan Penanaman Modal kepada Gubernur Kepala Daerah Provinsi.

C. Jurnal, Tesis dan Disertasi

<https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/jurnalbppk/article/view/163/107;>
[file:///C:/Users/user/Downloads/1262-2909-1-SM.pdf;](file:///C:/Users/user/Downloads/1262-2909-1-SM.pdf)
[http://repository.uir.ac.id/755/1/document%281%29.pdf;](http://repository.uir.ac.id/755/1/document%281%29.pdf)
[https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/;](https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/)
<https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/HKUM4306-M1.pdf>, Modul 1, Konsep Dasar Penelitian dan Penelitian Hukum, Hartiwiningsih;
https://www.academia.edu/36528619/MAKALAH_TEORI_KEADILAN;
[https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/8313/3/T1_312007058_BAB%20II.pdf;](https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/8313/3/T1_312007058_BAB%20II.pdf)
[file:///C:/Users/user/Downloads/151-485-1-PB.pdf;](file:///C:/Users/user/Downloads/151-485-1-PB.pdf)
[https://eprints.umm.ac.id/67152/3/BAB%20II.pdf;](https://eprints.umm.ac.id/67152/3/BAB%20II.pdf)

chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/21075/2/T1_312016217_BAB%20II.pdf;

file:///C:/Users/user/Downloads/151-485-1-PB.pdf;

chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/31185/1/Hilda%20Hilmiah%20Dimiyati.pdf

chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1290971003-3-BAB%20II.pdf;

chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/31185/1/Hilda%20Hilmiah%20Dimiyati.pdf;

https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/1388/888;

chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://repository.unair.ac.id/102776/4/4.%20BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf;

file:///C:/Users/user/Downloads/461-1-983-1-10-20200520.pdf;

chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1440820&val=4724&title=KEPASTIAN%20HUKUM%20BAGI%20PEMEGANG%20SERTIPIKAT%20HAK%20ATAS%20TANAH%20DALAM%20HAL%20TERDAPAT%20PEMBATALAN%20SERTIPIKAT%20MELALUI%20PUTUSAN%20PENGADILAN%20Studi%20Kasus%20Putusan%20PTUN%20Nomor%20%2015G2014PTUN-TPI%20di%20Kota%20Batam;

chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/131358-T%2027635-Pemberian%20hak-Analisis.pdf;

chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1290971003-3-BAB%20II.pdf;

chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/http://repository.uki.ac.id/6384/1/AKIB

ATHUKUMPEMBATALANAKTAJUALBELIPEJABATPEMBUATAKTATANAHTERHADAPSERTIFIKATAKATASTANAH.pdf, *slide* ke empat;

chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://repository.unmuhjember.ac.id/8494/2/Buku%20pak%20Manan_2.pdf;

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://law.uui.ac.id/wp-

content/uploads/2012/05/9%20Darwin%20Ginting.pdf;

file:///C:/Users/user/Downloads/10026-23564-1-SM.pdf;

chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://repo.unsrat.ac.id/439/1/PENEGAKAN_HUKUM_AGRARIA_DAN_PENYELESAIAN_SENGKETA_PERTANAHAN_DALAM_PROSES_PERADILAN.pdf;

chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://repository.uir.ac.id/3492/3/BAB%20II.pdf;

file:///C:/Users/user/Downloads/Kewenangan_Badan_Pertanahan_Nasional_Dalam_Penyele.pdf;

file:///C:/Users/user/Downloads/1087-Article%20Text-1792-1911-10-20110528.pdf;

http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/109/60;

chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://repository.uinbanten.ac.id/3806/4/BAB%202%20fix.pdf;

https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/91/75;

chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/2090/Tesis%20Yayuk.pdf?sequence=1;

chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/9649/2/igustingur-2171-1-13-igus-%29%201-2.pdf

Ana Silviana, *Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah*, Padecta: Research Law Jurnal Volume 7, Nomor 1, 2012;

Hasim Purba, *Reformasi Agraria dan Tanah untuk Rakyat: Sengketa Petani VS Perkebunan*, *Jurnal Law Review*, Volume 10, Nomor 2, Universitas Pelita Harapan, 2010;

Mochtar Kusuma Admadja, *Investasi di Indonesia dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Perjanjian Hasil Putaran Uruguay*, Jurnal Hukum, Volume 3, Nomor 5, Tahun 1996;

Ningrum H.R.S, *Analisa Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Berbasis Keadilan*, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 1 Nomor 2, <https://doi.org/10.26532/jph.vli2.1481>, 2014;

Sholih Mua'di, *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan Melalui Cara NonLitigasi (suatu Studi Litigasi dalam Situasi Transisional)*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008;

D. Seminar, Ceramah, Makalah dan Wawancara

Jimly Asshiddiqie, *Negara Hukum Indonesia*, Ceramah Umum Ikatan Alumni Iniversitas Jayabaya, Jakarta, 23 Januari 2010;

Maria S.W Sumardjono, *Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti*, Makalah disampaikan dalam *Seminar Kebijakan Baru di Bidang Pertanahan. Dampak dan Peluang Bagi Bisnis Properti dan Perbankan*, Jakarta, 6 Agustus 1997;

Indah Fitriani, *Makalah Evaluasi Atas Hambatan Investasi*, Universitas Indonesia, disampaikan sebagai Anggota Satuan Audit Internal, 26 Februari 2008;

Reksodiputro, Mardjono, *Resolution Legal Institution and Alternative Dispute*, Hasil Penelitian yang disajikan pada seminar nasional menyongsong penggunaan Hukum Era 2000, Semarang, 13 Agustus 1996;

Wawancara dengan ahli investasi atas nama Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA di kampus Universitas Kristen Indonesia (UKI), Cawang, Jakarta, tanggal 27 April 2023;

Wawancara dengan investor atas nama Sutikno Leksono Widodo, Komisaris PT. Seger Agro Nusantara di Surabaya, tanggal 3 Mei 2023.

E. Kamus dan Ensiklopedia

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.